

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah

Dimas Arif Prasetyo

¹Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia
Email : dimasarifprasetyoo55@gmail.com

Dedi Rusdi

²Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia
Email : dedirusdi@unissula.ac.id

ABSTRACT

This study or research aims to determine the effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Financing Surplus, Regional Original Revenues and Revenue Sharing Funds on capital expenditure in districts / cities in Central Java in 2017-2019.

The population in this research are all regencies / cities in Central Java for 2017-2019. Total sampling was used as sampling techniques and 35 local governments were selected as research samples. This research uses secondary data and multiple linear regression for data analysis

The results show that special allocation funds and financing surplus have negative effect for capital expenditure, while the general allocation funds, regional original revenues and revenue sharing funds have positive effect for capital expenditure.

Keywords : General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Financing Surplus, Regional Original Revenues, Revenue Sharing Funds and Capital Expenditure

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan memiliki bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di dalam provinsi jawa tengah pada tahun 2017-2019, yang diperoleh dari

kabupaten/kota di provinsi jawa tengah dari laporan realisasi anggaran kota/kabupaten tersebut.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Teknik yang digunakan adalah *total sampling*. Sehingga total 35 pemerintah daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan rangkaian data sekunder serta analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk analisis data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Fenomena dalam penelitian ini yang terjadi terkait belanja modal yang dapat dilihat diantaranya dimana rata-rata penyerapan anggaran tergolong rendah pada semester pertama dan menumpuk tinggi pada penghujung tahun. Dalam hal ini realisasi anggaran belanja modal tercatat pada tahun 2017 pada semester I terserap Rp 47,48 Triliun atau setara dengan 23,7 % dari alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan pada APBN tahun 2017 yang totalnya sebesar Rp 200,3 Triliun. Padahal dalam perekonomian belanja modal merupakan faktor pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui pengembangan infrastruktur serta dalam pengelolaan komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional memperlihatkan porsi belanja modal

sebesar 21,1% dari total belanja APBD pada tahun 2017. Hal ini memberikan indikasi mengenai pentingnya dan seriusnya pemerintah dalam alokasi anggaran belanja modal untuk urusan daerah.

Pada penulisan analisis dan penelitian ini penulis memutuskan objek penelitian yang digunakan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena dapat diketahui bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang menempati posisi kedua terendah untuk porsi belanja modal dalam skala nasional. Sedangkan kita ketahui pembangunan infrastruktur terus berkembang khususnya di daerah Jawa Tengah dan sumber utama dari belanja modal terletak pada PAD serta dana perimbangan termasuk didalamnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta dana bagi hasil. Hal ini tentunya menjadi tolak

ukur tersendiri mengingat penggunaan belanja modal yang digunakan untuk pengelolaan aset tetap yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan seperti pengembangan infrastruktur jalan kota serta pembangunan gedung serta fasilitas penting lainnya dimana aset tetap tersebut sangat dominan dibutuhkan dalam provinsi dengan mayoritas penduduk besar seperti di Jawa Tengah.

LITERATUR REVIEW

Belanja Modal

Berlandaskan PP No 27 tahun 2010 menjelaskan bahwasannya belanja pemerintah daerah merupakan belanja modal dimana memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta akan meningkatkan kekayaan daerah atau aset suatu daerah dan selanjutnya dapat meningkatkan belanja dimana sifatnya rutin, misalnya biaya pemeliharaan pada suatu kelompok belanja administrasi umum. Menurut penjelasan pada Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan belanja modal merupakan suatu pembentukan modal dari pengeluaran yang digunakan yang mana sifatnya meningkatkan kekayaan tetap atau persediaan yang dapat membagikan suatu dampak lebih dari satu periode akuntansi yang berjalan. Perlu dipahami bahwa pengalokasian dana belanja modal dalam suatu anggaran keuangan daerah sangat penting khususnya yang menyangkut pembangunan

infrastruktur atau aset tetap pada suatu daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berlandaskan pada UU No 33 tahun 2004 pasal 1 dijelaskan dimana variabel DAU adalah dana yang sumbernya berasal dari APBD dan kemudian disalurkan untuk tujuan pemerataan dalam hal kemampuan perolehan keuangan pada masing-masing daerah guna melengkapi kekurangan yang ada pada suatu daerah sebagai bentuk penyelenggaraan sistem desentralisasi. Sedangkan menurut (Halim, 2014) DAU merupakan sebuah dana transfer bersiat *block grant*, oleh karenanya daerah memiliki kebebasan dalam mempertimbangan kebutuhan selaras berdasar kondisi dan situasi daerah masing-masing.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan daerah dan pusat dijelaskan variabel DAK merupakan suatu dana yang sumbernya berupa pendapatan dari dalam APBN untuk mendanai kepentingan yang dilimpahkan kepada daerah sebagai bentuk realisasi dari sistem desentralisasi. Menurut (Halim, 2016) DAK merupakan dana yang asalnya dari APBN dan digunakan sebagai bentuk pendanaan program tertentu pada suatu daerah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Dalam peraturan yang tertuang pada peraturan pemerintah dalam negeri (permendagri) Nomor 13 tahun 2006, dijelaskan bahwa (SiLPA) merupakan sisa dana dimana perolehannya berasal dari pengeluaran selama satu periode serta aktualisasi penerimaan. Secara garis besar SiLPA dapat diartikan sebagai selisih antara surplus ataupun defisit anggaran dalam neto dimana dalam penyusunan APBD dana (SiLPA) seharusnya menunjukkan nilai nol, dengan maksud bahwa dalam pengelolaan anggaran maka penerimaan anggaran harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi dalam periode tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Halim, 2016), PAD adalah segala jenis penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari ekonomi murni daerah tersebut. Berdasarkan UU RI No 33 tahun 2004 yang menjelaskan mengenai keterimbangan hubungan keuangan antara daerah dan pusat menjelaskan bahwa penghasilan murni suatu daerah atau PAD adalah penghasilan yang perolehannya berdasarkan peraturan daerah selaras dengan regulasi yang ditetapkan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa DBH adalah dana

dimana sumbernya dari APBN dan kemudian disalurkan menuju setiap daerah dengan prosentase dalam pendanaan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan program desentralisasi. Dapat dikatakan bahwa DBH dana dana yang vital perannya bagi suatu daerah yang menerima sumber pendapatan dari pusat pada daerahnya. Perolehan tersebut dapat berupa pajak perorangan (PPH Perorangan) atau pajak dari pusat, bea perolehan atas bangunan serta tanah, pajak bangunan dan bumi serta perolehan yang sumbernya dari SDA yang ada pada daerah tersebut meliputi gas alam, minyak bumi, pertambangan, hutan dan sumber daya laut dalam bidang perikanan dan lainnya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

(DAU) adalah suatu dana yang diberikan pada pemerintah suatu daerah yang sumbernya dari APBN dimana pengalokasiannya memiliki tujuan untuk pemerataan antara keuangan daerah dimana pemerataan ini ditujukan untuk mendanai pengeluaran pada daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka dapat dikatakan terjadi erpindahan yang signifikan antara pemerintah pusat menuju pemerintah daerah. Dengan menggunakan DAU sebagai belanja

modal maka pemerintah daerah dapat menggunakan ini sebagai dana pelayanan bagi masyarakat.

Berdasar studi yang dilakukan oleh (Kuntari, 2019) menyatakan bahwa DAU berdampak secara signifikan dan positif pada belanja modal. Sedangkan menurut (Isti, 2016) Mengungkapkan bahwa DAU berdampak signifikan serta positif pada belanja modal. Sedangkan menurut (Setiyani, 2015) mengemukakan bahwa DAU tidak berdampak signifikan terhadap belanja modal pada suatu daerah. Berdasar pada penelitian dan pendapat tersebut maka disimpulkan dugaan sementara atau hipotesis alternatif seperti berikut.

H1 : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana yang asalnya dari APBN yang kemudian dana tersebut digunakan untuk mendanai daerah dalam kaitannya dengan pekerjaan khusus yang menjadi prioritas nasional dimana dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan dana ini ditujukan untuk kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana serta prasarana fasilitas umum, investasi pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat daerah secara langsung dengan umur ekonomis yang panjang.

Dengan adanya pengelolaan dan pengalokasian dana ini diharapkan adanya suatu pengaruh bagi belanja modal. Sebagaimana tujuannya variabel DAK ini dapat meningkatkan aset yang bersifat tetap pemerintah dalam prosesnya untuk keperluan fasilitas masyarakat secara langsung.

Menurut (Isti, 2016), mengutarakan variabel DAK berdampak secara signifikan dan positif terhadap belanja modal. Sementara itu menurut (Tolu, 2016) berpendapat bahwa DAK tidak berdampak secara signifikan pada variabel belanja modal. Sedangkan menurut (Susilowati & Rahmadewi, 2017) mengutarakan DAK berdampak signifikan serta positif pada variabel belanja modal. berbeda dengan yang dihasilkan oleh (Fernandi & Nur, 2016) dimana mereka menyampaikan bahwa DAK berdampak negatif pada variabel belanja modal. Berdasar pada penelitian serta pendapat tersebut maka disimpulkan dugaan sementara atau hipotesis alternatif seperti berikut.

H2 : DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah suatu sisa dana yang perolehannya berasal dari aktualisasi pengeluaran dan

penerimaan anggaran suatu daerah dalam satu periode. Sedangkan menurut PP No. 58 tahun 2005 SiLPA adalah sisa lebih dari pengeluaran dan penerimaan anggaran selama satu periode. Menurut (Ardhini & handayani, 2011) mengemukakan bahwa SiLPA berdampak positif pada belanja modal. Selaras dengan pendapat (Kusnandar & Siswanto, 2012) yang mengutarakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara SiLPA dengan belanja modal.

Sedangkan penelitian serta analisis oleh (Bayu Samoedra, 2016) juga menyampaikan hal yang sama dimana SiLPA berdampak secara positif dan signifikan pada belanja modal. Menurut (Farrel, 2015) SiLPA yang didapatkan setiap tahunnya akan berdampak pada penambahan pendapatan, karena pertambahan jumlah penghasilan yang didapatkan dari sisa lebih suatu kegiatan atas anggaran yang dilakukan melalui pemda setempat. Begitupula menurut (Aprizay et al, 2014) menyatakan bahwa untuk menutup belanja modal serta realisasi maka digunakan SiLPA yang terdapat pada tahun sebelumnya, Namun berbeda dengan (Martini & Dwirandar, 2015) berpendapat bahwasanya SiLPA berdampak negatif pada variabel belanja modal. Berdasarkan pendapat dan penelitian yang dilakukan jadi bisa di hasilkan alternatif hipotesis seperti berikut ini :

H3 : SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

PAD adalah suatu pendapatan asli daerah dimana peranannya penting bagi belanja modal daerah. Jika semakin tinggi nilai PAD yang didapatkan daerah maka semakin menunjukkan kemandirian suatu daerah tersebut. Kemudian dengan PAD ini diharapkan pemerintah dapat mengelola belanja modal suatu daerah dan dapat memaksimalkannya untuk memnuhi fasilitas masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Venkataraman & Urmi, 2017) mengemukakan bahwa baik dalam jangka pendek atau PAD akan mempunyai dampak positif pada variabel belanja modal terkait bidang pembangunan daerah. Begitu juga menurut (Muda & Azura, 2018) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berdampak signifikan serta positif terhadap belanja modal. Menurut (Isti, 2016) PAD berdampak secara signifikan serta positif terhadap belanja modal. Sedangkan menurut (Winda, 2013) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Berdasar pada penelitian dan pendapat tersebut maka disimpulkan dugaan sementara atau hipotesis alternatif seperti berikut.:

H4 : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

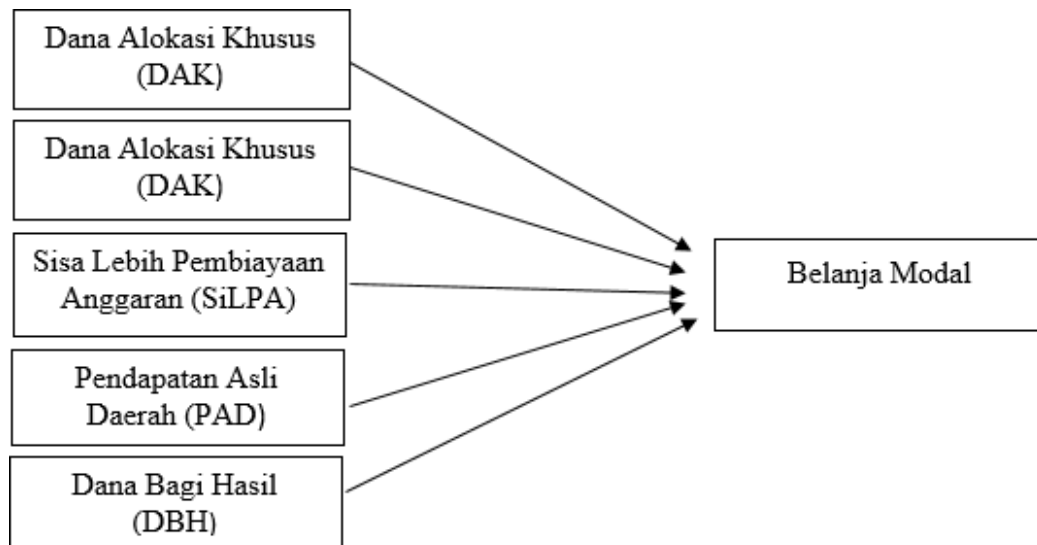
Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa DBH adalah suatu dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada daerah yang telah tertera dalam APBN. Dana ini dialokasikan berdasarkan angka presentase tertentu dimana tujuannya adalah dalam rangka pelaksanaan sistem desentralisasi. Inti dari DBH terdapat pada sda serta pajak, bagi hasil pajak terdiri atas BPHTB, PBB, PPh Pasal 21, 25 dan 29. Sedangkan DBH yang asalnya dari sumber daya alam diantaranya berasal dari hutan, pertambangan gas dan minyak bumi, perikanan. Dalam penggunaannya belanja oleh pemda atas pengalokasian DBH agar dapat memberikan kebebasan dalam penggunaan belanja tersebut, namun tetap ada beberapa alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Anggaran DBH merupakan penghasilan yang cukup potensial

dari suatu daerah serta merupakan modal tinggi pemda dalam memperoleh suatu dana pembangunan serta tercukainya belanja daerah yang asalnya bukan dari PAD selain DAK dan DAU. Penelitian yang membahas mengenai dampak dari dana bagi hasil pada variabel belanja modal telah dikerjakan diantaranya oleh peneliti (Wandira, 2013) serta (Darmayasa dan Sunandi, 2014) mendapati hasil bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni dan Adi, 2009) dan (Ramadhan, 2016) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berdampak secara negatif dan tidak signifikan bagi belanja modal baik yang sumbernya berasal dari pajak maupun Sumber Daya Alam (SDA). Berdasar pada penelitian dan pendapat tersebut maka disimpulkan dugaan sementara atau hipotesis alternatif seperti berikut.:

H5 : DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal



METODE PENELITIAN

Pemerintahan kota/kabupaten daerah provinsi jateng menjadi populasi yang diterapkan pada penelitian ini dalam bentuk laporan realisasi anggaran untuk rentang periode penelitian pada tahun 2017 - 2019. Dalam penelitian ini digunakan teknik *total sampling* yang artinya adalah suatu teknik dimana seluruh populasi yang ada dapat dijadikan sampel. Dimana sampel yang diambil adalah LRA Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2017 – 2019.

pada penelitian ini data yang digunakan dan diolah berupa data sekunder. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Data yang dipakai pada skripsi ini adalah (LRA) Kota/Kabupaten di Jateng tahun

2017-2019. Dalam penelitian ini pengambilan data tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui data laporan realisasi anggaran (LRA) Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses melalui semarang.bpk.go.id dalam laman web tersebut telah tertera LRA pemerintah kota/kabupaten se provinsi jawa tengah periode 2017 - 2019 yang menjadi sumber data pada penelitian ini.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda dengan SPSS versi 25 untuk menguji pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal

Tabel 1

Variabel Operasional dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Sumber
1	Belanja Modal	Belanja modal adalah suatu pengeluaran dalam rangka pembentukan modal dimana sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang dapat memberikan suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang berjalan.	Belanja modal dalam birokrat daerah dapat dukur dan dilihat dari total belanja modal pada Anggaran Pendapatan di pos belanja dan Belanja Daerah di tiap tiap pemerintah daerah kota/kabupaten.	Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU merupakan dana yang perolehannya berasal dari APBD yang kemudian disalurkan agar tercipta daerah yang rata dalam hal kemampuan keuangan untuk melengkapi suatu kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi	Kebutuhan dana alokasi umum pada daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep alokasi dasar. Celah dan celah fiskal. fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah.	Undang-undang No. 33 Tahun 2004

3	Dana Alokasi Kusus (DAK)	DAK adalah suatu anggaran yang berasal dari APBN dimana digunakan dengan tujuan untuk mendanai program tertentu pada suatu daerah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.	Pengalokasian DAK memperhatikan adanya dana dalam APBN, yang artinya adalah besaran nilai DAK tidak dapat dipastikan apabila daerah menghadapi masalahmasalah khusus. setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah	(Permanasari, 2013)
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	SiLPA adalah suatu sisa dana yang pendapatannya berasal dari aktualisasi pengeluaran dan penerimaan anggaran daerah dalam satu periode.	Sisa lebih pembiayaan anggaran dapat diukur dengan cara mengurangi surplus/disit dari pendapatan dengan pembiayaan neto	Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD adalah aliran dana yang masuk ke kas daerah, dimana aliran dana tersebut berasal dari pajak, dana transfer serta beberapa pendapatan retribusi daerah lainnya	Tolak ukur Pengukuran PAD dilihat dari total PAD untuk tiap Kota/kabupaten yang sumbernya dari data LRA dalam pos pos pendapatan	Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
6	Dana Bagi Hasil (DBH)	DBH merupakan dana yang asalnya dari APBN yang kemudian disalurkan kepada setiap daerah dengan prosentase dalam pendanaan daerah tersebut dalam rangka	Dana bagi hasil dapat diukur dan dinilai dari penjumlahan dari total DBH yang asalnya dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber	Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

		pelaksanaan program desentralisasi.	dari sumber daya alam	
--	--	-------------------------------------	-----------------------	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2

	N Statistika	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Dana Alokasi Umum	105	440.041.244.000	1.441.765.282.000	971.931.176.738,32	248.982.742.247,786
Dana Alokasi Khusus	105	44.047.154.742	817.365.659.000	277.425.073.509,95	126.124.900.733,115
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	105	6.559.043.240	467.281.226.000	186.863.871.753,57	96.144.225.831,524
Pendapatan Asli Daerah	105	179.224.408.698	2.066.333.418.588	396.687.659.813,05	277.880.563.533,611
Dana Bagi Hasil	105	17.113.151.303	323.598.587.000	49.422.640.427,08	49.253.952.987,306
Belanja Modal	105	56.509.976.630	1275359088966	395.880.739.114,17	184.463.736.910,639
Valid N	105				

Dana Alokasi Umum (DAU) pada Uji Statistik yang dilakukan dalam *research* berikut ini dengan 35 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jateng didapatkan data dengan nilai maksimum sebesar Rp 1.441.765.282.000, nilai minimum sebesar Rp 440.041.244.000, rata-rata sebesar Rp 971.931.176.738,32 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil sebesar 248982742247,786. maka dapat ditarik kesimpulan variabel DAU dapat terdistribusi secara merata.

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Uji Statistik yang dilakukan dalam *research* ini dengan 35 kota/kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah didapatkan data dengan nilai maksimum sebesar Rp 817.365.659.000, nilai minimum sebesar Rp 44.047.154.742, rata-rata sebesar Rp 277.425.073.509,95 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil sebesar Rp 126.124.900.733,115. maka dapat ditarik kesimpulan variabel DAK dapat terdistribusi secara merata.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Uji Statistik yang dilakukan pada penelitian berikut dengan 35 kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah didapatkan data dengan nilai maksimum sebesar Rp 467.281.226.000, nilai minimum sebesar Rp 6.559.043.240, rata rata sebesar Rp 186.863.871.753,57 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil sebesar Rp 96.144.225.831,524.maka dapat ditarik kesimpulan variabel SiLPA dapat terdistribusi secara merata.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Uji Statistik yang dilakukan pada penelitian berikut dengan 35 kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah didapatkan data dengan nilai maksimum sebesar Rp 2.066.333.418.588, nilai minimum sebesar Rp 179.224.408.698, rata rata sebesar Rp 396.687.659.813,05 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil sebesar Rp 277.880.563.533,611, .maka dapat ditarik kesimpulan variabel PAD dapat terdistribusi secara merata.

Dana Bagi Hasil (DBH) pada Uji Statistik yang dilakukan pada penelitian berikut dengan 35 kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah didapatkan data dengan nilai maksimum sebesar Rp 323.598.587.000, nilai minimum sebesar Rp 17.113.151.303, rata rata sebesar Rp 49.422.640.427,08 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil sebesar Rp 49.253.952.987,306 maka dapat ditarik kesimpulan variabel DBH dapat terdistribusi secara merata.

Belanja Modal pada Dalam Uji Statistik yang dilakukan pada penelitian berikut dengan 35 kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah didapatkan data dengan nilai maksimum sebesar Rp 1.275.359.088.966, nilai minimum sebesar Rp 56.509.976.630, rata rata sebesar Rp 395.880.739.114,17 dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil sebesar Rp 184.463.736.910,639 maka dapat diitarik kesimpulan variabel belanja modal dapat terdistribusi secara merata

HASIL UJI NORMALITAS

Tabel 3

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000151
	Std.Deviation	92017932901,63545000
Most Exxtreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,045
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji normalitas dimana dalam prosesnya digunakan uji Onesample Kolmogorov-Smirnov seperti diatas dapat diketahui bahwa

nilai signifikasinya adalah 0,200 dimana nilai ini > 0,05 oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa data memiliki distribusi yang normal.

HASIL UJI MUTIKOLINEARITAS

Tabel 4

Keterangan		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dana Alokasi Umum	,509	1,963
	Dana Alokasi khusus	,668	1,497
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	,837	1,194
	Pendapatan Asli Daerah	,666	1,501
	Dana Bagi Hasil	,829	1,207

Hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel independent adalah <10 serta nilai *tolerance* untuk seluruh variabel bebas adalah >0,10.

Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasar uji yang dilakukan maka model regresi yang dilakukan tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebasnya.

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Tabel 5

Variabel	Sig	Keterangan
Dana Alokasi Umum	,674	Bebas gejala heterokedastisitas
Dana Alokasi khusus	,079	Bebas gejala heterokedastisitas
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	,140	Bebas gejala heterokedastisitas
Pendapatan Asli Daerah	,201	Bebas gejala heterokedastisitas
Dana Bagi Hasil	,259	Bebas gejala heterokedastisitas

Berlandaskan tabel 4.5 diatas. Dapat diambil kesimpulan mengenai hasil uji yang telah dilakukan dimana keseluruhan dari variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ jadi

dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas pada *research* yang diterapkan ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

HASIL UJI AUTOKORELASI

Tabel 6

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,677 ^a	,458	,430	,29239	2,193

Berdasarkan hasil uji diatas didapatkan nilai Durbin Watson (DW) senilai 2,193. Dalam uji ini digunakan data dengan nilai $k=5$ dan nilai $n=105$ kemudian dapat diambil nilai d_u sebesar 1,7827 sehingga nilai dari $4 - d_U = 4 - 1,7827 = 2,273$ sehingga bisa disimpulkan model regresi yang diuji ini tidak terjadi atau terjadi autokorelasi karna sesuai dengan kriteria atau rumus yang menyatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi dengan rumus $(d_U) < (d)$

$< (4 - d_U)$ dengan nilai yang dimasukan menjadi $(1,7827) < 2,193 < (2,273)$.

ANALISIS LINEAR BERGANDA

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, model regresi yang baik adalah model regresi yang sesuai dan memenuhi kriteria dari uji asumsi klasik yang sudah dilakukan dimana data terdistribusi secara normal tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas dan tidak terjadi

autokorelasi. Model penelitian ini dikatakan baik karna sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya

dilakukan analisis regresi dimana hasil analisis regresi linear berganda dpat diuraikan seperti berikut ini.

Tabel 7

Keterangan	Unstandardized Coeficients		t	Sig
	B	Std. Error		
1 (Constanta)	-1,521	2,085	-,730	,467
Dana Alokasi Umum	,478	,187	2,555	,012
Dana Alokasi Khusus	-,015	,061	2,555	,800
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	,058	,044	1,321	,190
Pendapatan Asli Daerah	,374	,128	2,914	,004
Dana Bagi Hasil	,211	,067	3,170	,002

Berlandaskan pada uji regresi linear berganda diatas, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = -1,521 + 0,478 \text{ DAU} + (-0,015) \text{ DAK} + 0,058 \text{ SiLPA} + 0,374 \text{ PAD} + 0,211 \text{ DBH} + e$$

Persamaan diatas dapat dijabarkan artinya sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta yang dihasilkan adalah -1,521 artinya bahwa jika variabel bebas dianggap nilainya konstan jadi nilai dari belanja modal atau variabel dependen adalah -1,521
- b. Nilai Koefisien dari DAU (X1) adalah 0,478 dapat dimaknai jika koefisien variabel DAU naik satu satuan dengan asumsi variabel independent lainnya tetap dapat menaikkan nilai variabel belanja modal (Y) senilai 0,478
- c. Nilai Koefisien dari DAK(X2) senilai -0,015 artinya jika koefisien variabel dana alokasi khusus naik satu satuan dengan

asumsi variabel bebas lainnya tetap akan dapat menurunkan nilai variabel belanja modal (Y) senilai -0,015

- d. Nilai Koefisien dari SiLPA (X3) adalah 0,058 artinya jika koefisien variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran naik satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap maka akan menurunkan nilai variabel belanja modal (Y) senilai 0,058
- e. Nilai Koefisien dari PAD (X4) adalah 0,374 dapat dimaknai jika koefisien variabel PAD naik satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap akan dapat menaikkan nilai variabel belanja modal (Y) senilai 0,374
- f. Nilai Koefisien dari DBH (X5) adalah 0,211 artinya jika koefisien variabel dana bagi hasil naik satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap akan dapat menaikkan nilai variabel belanja modal (Y) senilai 0,211

PENGUJIAN HIPOTESIS

HASIL UJI *t* (*t-test*)

Keterangan	T	Sig
(Constant)	-,730	,467
Dana Alokasi Umum	2,555	,012
Dana Alokasi Khusus	-,254	,800
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran	1,321	,190
Pendapatan Asli Daerah	2,914	,004
Dana Bagi Hasil	3,170	,002

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.8 bisa dicermati bahwa nilai *t* senilai 2,555 dengan nilai signifikasinya senilai 0,012 yang artinya nilainya < 0,05. Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan dari hasil tersebut bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini memberikan simpulan bahwa hipotesis yang pertama yang berbunyi variabel pengaruh DAU berdampak positif pada variabel belanja modal diterima.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *t* senilai (-0,254) dengan nilai signifikasinya senilai 0,800 dimana artinya nilainya > 0,05. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan dari hasil yang diperoleh bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini memberikan simpulan bahwa hipotesis yang pertama yang berbunyi variabel pengaruh DAK berdampak positif pada variabel belanja modal ditolak.

3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal
 Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *t* sebesar 1,321 dengan nilai signifikasinya senilai 0,190 yang artinya nilainya > 0,05. Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil diatas bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini memberikan simpulan bahwa hipotesis yang pertama yang berbunyi variabel SiLPA berdampak positif pada variabel belanja modal ditolak.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *t* senilai 2,914 dengan nilai signifikasinya senilai 0,004 yang artinya nilainya < 0,05. Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini memberikan simpulan bahwa hipotesis yang pertama yang berbunyi variabel PAD berdampak positif pada variabel belanja modal diterima.

5. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *t* senilai 3,170 dengan nilai signifikasinya senilai 0,002 yang artinya nilainya < 0,05. Oleh karenanya dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil diatas bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini memberikan simpulan bahwa hipotesis yang pertama yang berbunyi variabel pengaruh DBH berdampak positif pada variabel belanja modal diterima

HASIL UJI SIMULTAN F

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
7,080	5	1,416	16,56	,000 ^b
8,378	98	,085	3	
15,458	103			

Tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai F sebesar 16,563 dan nilai signifikasinya yang bernilai 0 dimana artinya nilai sig < 0,05 atau ($0 < 0,05$). Oleh karena itu dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil diatas bahwa variabel DAU, DAK, SiLPA, PAD dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal.

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,677 ^a	,458	,430	,29239

Pada tabel diatas atau hasil yang disajikan nilai dari adjusted R square yang didapatkan adalah 0,430 atau 43%. Hasil ini dapat diartikan bahwa dampak variabel DAU, DAK, SiLPA, PAD dan DBH pada variabel belanja modal senilai 43% dan sisanya 57% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang ada diluar pada variabel yang diuji.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil *research* serta analisis yang sudah diterapkan, menemukan hasil dimana hipotesis yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal **diterima**. Hasil berikut selaras dengan uji yang dilakukan dimana diantaranya dalam uji t menyatakan bahwa nilai signifikansi dari DAU sebesar 0,012 dimana dapat diartikan bahwa nilainya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membrikan bukti dimana hipotesis dapat diterima.

Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai dari variabel DAU yang ditransfer atau dialirkan kepada daerah oleh pemerintah pusat maka dapat semakin tinggi kenaikannya, kemudian juga dana yang kemudian akan di alokasikan untuk anggaran belanja modal. Oleh sebab itu dapat disimpulka bahwa dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kota/kabupaten pada provinsi jawa tengah pada tahun 2017-2019 sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan daerah. Selain itu variabel DAU yang disalurkan juga dipakai sebagai pembiayaan pelayanan serta fasilitas publik serta infrastruktur kota dan kabupaten pada provinsi jawa tengah. Dari analisis dan penjabaran dapat

ditarik simpulan bahwa pemerintah kota/kabupaten di provinsi jawa tengah pada periode 2017-2019 masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dalam rangka pembiayaan fasilitas publik dan dana infrastruktur daerah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah diteliti oleh (Kuntari, 2019) serta (Isti, 2016) dimana keduanya mengungkapkan variabel DAU berdampak positif pada belanja modal. Namun penelitian ini berbeda (Setiyani, 2015) Yang menyatakan variabel DAU tidak berdampak secara signifikan pada variabel belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dari hasil data *research* serta analisis yang sudah diterapkan menemukan hasil bahwa hipotesis yang menyimpulkan dana alokasi khusus (DAK) berdampak secara positif terhadap belanja modal **ditolak**. Hal ini selaras dengan data dari uji yang dilakukan dimana diantaranya dalam uji t menyatakan jika nilai signifikansi DAK bernilai 0,800 yang artinya nilainya lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut memberikan bukti bahwa hipotesis ditolak. Oleh sebab itu dapat diartikan dimana hubungan DAK terhadap belanja modal kota/kabupaten di provinsi jawa tengah pada tahun 2017-2019 tidak berdampak secara positif.

Berdasarkan data statistik deskriptif dapat dilihat bahwa perolehan nilai rata rata untuk DAK adalah Rp.277.425.073.509,95 lebih besar dari nilai standar deviasnya yang memiliki nilai sebesar Rp.126.124.900.733,115 hal ini menunjukkan bahwa data DAK bersifat mengelompok. Total aliran DAK pada daerah kota/kabupaten di provnsi jawa tengah pada tahun 2017 sampai 2019 terus meningkat. Untuk realisasi 2017 sebesar Rp. 8.638.299.901.352, pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.384.144.911.288 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.657.827.426.236. Namun hal ini tidak berdampak pada kenaikan nilai belanja modal. Alasan kuat yang menjadikan hipotesis DAK berdampak positif terhadap belanja modal ditolak diantaranya karena nilai prosentasi dari jumlah belanja lainnya tergolong tinggi. Dimana dapat diketahui bahwa sifat dari DAK bersifat *flesibel* seperti berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Andri Ebisker Napitutu, Vaya Julliana Dillak, 2018) dalam penelitiannya terhadap dana alokasi khusus dengan sampel penelitiannya pada provinsi jawa barat tahun 2013-2016 menyatakan hal yang serupa bahwa alokasi dari dana alokasi khusus bukan hanya dialokasikan untuk kebutuhan belanja modal saja namun untuk dana lainnya seperti belanja operasional. Hal hal berikut ini yang menjadikan latar belakang dimana hipotesis tersebut

ditolak karena aliran dana alokasi khusus tidak bisa terserap masuk sepenuhnya ke belanja modal.

Pada LRA Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat nilai dan prosentase terkait anggaran belanja pada masing masing pos pos anggarannya. Dalam kaitannya dengan anggaran belanja, peneliti telah melampirkan perbandingan anggaran belanja modal dengan anggaran belanja operasional pada (Lampiran 8) dimana pada tahun 2017 untuk prosentasi belanja operasional sebesar 95,61% sedangkan untuk prosentase belanja modalnya sebesar 91,22%. Kemudian LRA di tahun 2018 prosentase belanja operasional sebesar 92,84% dengan prosentase belanja modal 88,51% begitupula dengan LRA tahun 2019 dimana prosentase belanja operasional sebesar 94,75% sedangkan untuk belanja modal adalah 88,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan belanja oprasional pada daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah pada tahun 2017-2019 lebih tinggi sehingga aliran dana alokasi khusus juga masuk ke belanja operasional tersebut. Misalnya terjadi bencana alam atau adanya suatu bantuan sosial untuk masyarakat maka dana alokasi khusus dapat dikucurkan untuk belanja operasional dalam bentuk bantuan sosial. Dan juga kita pahami bahwa dana alokasi khusus bersifat *fleksibel* dimana anggaran yang dikucurkan tidak tetap

atau sesuai dengan kebutuhan nasional pada daerah tersebut.

Hasil penelitian ini dikuatkan dengan hasil *research* terdahulu yang diteliti oleh (Fernandi & Nur, 2016) dimana mereka mengungkapkan dimana variabel dana alokasi khusus atau DAK tidak berdampak secara positif terhadap belanja modal hal ini disebabkan pemerintah daerah tidak tergantung dengan DAK melainkan dengan dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) yang dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan aset baik itu aset yang jenisnya tetap ataupun aset dengan bentuk atau jenis yang lain yang akan memberikan dampak ataupun manfaat secara nyata. Berbda dengan penelitian atau *research* yang telah dilakukan oleh peneliti (Isti, 2016) serta (Susilowati & Rahmadewi, 2017) dimana dari hasil analisis mereka dapat disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan serta positif pada belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis serta *research* atas data data yang diteliti didapatkan bahwa hipotesis yang menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdampak positif pada belanja modal **ditolak**, Hal ini sesuai dengan uji t yang telah dilakukan dimana nilai signifiansi

yang diperoleh bernilai 0,190 dimana nilai itu lebih dari 0,05 atau dapat dituliskan dengan $0,190 > 0,05$. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis ditolak. Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan variabel SiLPA terhadap belanja modal kota/kabupaten di provinsi jawa tengah periode 2017-2019 tidak berpengaruh atau berdampak secara positif.

Berdasarkan data statistik deskriptif yang telah dilakukan, dihasilkan data dengan riincian nilai rata rata untuk sisa lebih pembiayaan anggaran adalah Rp.186.863.871.753,57 lebih besar dari nilai standar deviasnya yang memiliki nilai sebesar Rp. 96.144.225.831,524 hal ini menunjukkan bahwa data SiLPA bersifat mengelompok. Total dana sisa lebih pembiayaan anggaran pada daerah kabupaten/ kota di provnsi jawa tengah dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Untuk realisasi 2017 sebesar Rp 6.460.894.882.481, pada tahun 2018 sebesar Rp.5.971.549.074.436 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.5.961.117.792.372, Namun hal ini tidak berdampak secara positif terhadap kenaikan nilai belanja modal.

Alasan kuat yang mendasari hipotesis yang menyimpulkan bahwa variabel SiLPA berdampak secara positif pada variabel belanja modal ditolak adalah karena sifat dari SiLPA

itu sendiri yang merupakan dana sisa dari ralisasi anggaran pada daerah dimana sisa ini digunakan untuk membiayai atau menutup keperluan belanja lain di periode selanjutnya. Dana ini tidak hanya dialokasikan untuk belanja modal tetapi juga untuk belanja lain lainnya misalnya seperti belanja operasional. Dalam LRA provinsi jawa tengah seperti yang diaparkan di (Lampiran 8). Realisasi belanja operasional dari tahun 2017 sampai 2019 masing masing dengan prosentase 95,61% , 92,84% dan 94,75% angka ini lebih tinggi dari nilai prosentase belanja modal dengan prosentase dari tahun 2017 sampai 2019 secara berturut turut 91,22%, 88,51% dan 88,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan belanja oprasional pada daerah kota/kabupaten di provinsi jawa tengah pada periode 2017-2019 lebih tinggi sehingga aliran dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA juga masuk ke belanja operasional tersebut.

Penelitian ini dan analsis yang telah dilakukan didukung dengan hasil *research* dan analisis terdahulu yang dilakukan oleh (Martini & Dwirandar, 2015) dimana mereka berpendapat bahwa dana SiLPA berdampak negatif pada belanja modal, hal ni terjadi karena dana sisa lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh sebagian besar disumbangkan ke belanja operasional dibandingkan disalurkan ke belanja modal. Namaun hasil analsis atau

penelitian ini berbeda dengan *study* dan *research* yang diteliti oleh (Ardhini & Handayani, 2011) menyatakan dimana variabel SiLPA berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. Hal ini juga sama dengan penelitian dan analisis yang telah diujikan oleh (Bayu Samoedra, 2016) yang menyatakan bahwa SiLPA berdampak secara positif tpada variabel belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis dan *research* yang dilakukan. Hipotesis yang menyatakan pendapata asli daerah berpengaruh atau berdampak secara positif terhadap belanja modal **diterima**. Hal ini sesuai dengan uji yang dilakukan, salah satunya pada uji t dimana nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,004 dimana nilai ini kurang dari 0,05 atau dapat dituliskan dengan $0,004 < 0,05$ sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.

Dari hasil yang didapatkan bisa diartikan bahwa ketergantungan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah masih tinggi serta perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemda kota/kabupaten di Jawa Tengah masih mengandalkan dana sumber pendapatan transfer dari pusat untuk membiayai belanja modal Tentunya pemerintah pusat sangat

berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah masing masing. Dimana dari analisis yang dilakukan pendapatan asli daerah di provinsi jawa tengah pada tahun 2017 sampai 2019 tinggi namun tetap perlu ditingkatkan lagi. Hasil analisis yang dilakukan selaras dengan analisis dan penelitian yang telah diujikan oleh (Muda & Azura, 2018), (Isti, 2016), yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis yang dilakukan dimana hipotesis yang menyatakan bahwa dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal berpengaruh secara positif diterima. Hal ini selaras dengan uji yang digunakan, salah satunya pada uji t dimana hasil nilai signifikansi yang dihasilkan bernilai 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 atau dapat dituliskan dengan $0,002 < 0,05$ Hal ini membuat hipotesis penilitian yang dilakukan diterima.

Pada dasarnya DBH adalah penghasilan suatu daerah yang sumbernya perolehannya berasal dari pemerntah pusat dimana penerimaan daerah tersebut berupa (DBH pajak) serta (DBH SDA) atau sumber daya alam. Dimana dari analisis yang dilakukan dana bagi hasil berpengaruh positif sehinga dapat

diartikan bahwa dana ini sangat potensial untuk digunakan sebagai pembiayaan dana daerah dalam hal pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung atau bentuk lainnya. Pembangunan tatanan infrastrukture dan sistem pelayanan publik dengan sitem yang terstruktur dan bagus melalui belanja modal adalah harapan dan tujuan yang dilakukan oleh pemda dengan menggunakan aliran dana dari DBH. Sehingga pengelolaan DBH di daerah kabupaten/kota provinsi jawa tengah sangat tinggi ketergantungannya dengan belanja modal dan perlu ditingkatkan.

Hasil analisis ini selaras atau selaras dengan analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh (Darmayasa & Sunandi, 2014), (Winda, 2013) mengungkapkan jika DBH berdampak secara positif pada belanja modal. Berbeda dengan hasil analisis yang telah diujikan oleh (Wahyuni & Adi, 2009) serta (Ramadhan, 2016) yang mangutarakan variabel DBH berdampak secara negatif pada variabel belanja modal, baik berkaitan dengan pajak ataupun sumber daya alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipoteisis maka dapat disimpulkan bahwa varaibel dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil (DBH) berpengaruh

positif terhadap belanja modal. Sedangkan variabel dana alokasi khusus (DAK) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif terhadap variabel belanja modal.

Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan adalah :

a). Bagi Pemerintah

Dari analisis dan pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan lagi penggunaan dana tersebut untuk digunakan sebagai pembangunan pelayanan dan kebutuhan publik yang menjadi fokus daerah kabupaten/kota masing masing. Kemudian pemerintah daerah tiap tiap kabupaten/kota di provinsi jawa tengah diharapkan untuk dapat mengupdate website resmi pemerintah daerah masing masing. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat mudah mengakses data laporan yang dapat diunggah dan memberikan kepercayaan bagi masyakarat kepada pemerinta daerah.

b). Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis menggunakan variabel yang lebih banyak lagi dan tahun periode yang update. Dalam kaitannya dengan

belanja modal, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel “Pertumbuhan Ekonomi”. Alasannya adalah karena untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan pengadaan aset tetap yang berupa infrastruktur dan fasilitas lain dimana dana pengalokasian anggarannya berasal dari belanja modal. Sehingga terdapat hubungan yang dapat diteliti untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a). Penelitian dan analisis ini hanya dilakukan dengan menggunakan 5 variabel independent
- b). Tahun yang menjadi fokus penelitian bersifat terbatas sehingga hanya tertuju pada 3 periode yaitu tahun 2017-2019.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 26–30.

Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017, XV*, 42-56.

Ananda, R. M., & Tarmizi, H. (2017). The Effect Of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Special Autonomy Funds On Capital Expenditure With Economic Growth As Moderating Variables In The Government Of The District / City In Aceh Province In 2008 – 2017. *Economic and Finance, 1(1)*, 1–13.

Andri Tolu dkk. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kota Pada Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah, volume 16, no 2*.

Arbie, G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*.

Ardhini, & Handayani, S. (t.thn.). Pengaruh rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah).

Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap

- belanja modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2016. *AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 2 NO. 2 OKTOBER 2018*, 169-182.
- Bolen, K. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District / City in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 129–147. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583>
- Cooper, R., & Schindler, S. (2006). *Metode Riset Bisnis*.
- Erlina, & Rasdianto. (t.thn.). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*l.
- Farel, R. (2015). Faktor Faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Signifikan Vol. 4 No. 2 Oktober 2015*, 189-210.
- Febriana, I., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam SPSS*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetak*an ke VIII.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Gregorius. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flaypaper Effect Kabupaten/kota di Jawa tengah tahun 2006-2008. *TEMA. Vol 6 edisi 1*.
- Habibi, M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 117–124.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. (2010). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Cet 11*.
- Hariyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5,.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Hermawan, A. D., Made, A., & Y, D. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap pengalokasian Belanja Modal. Study empiris pada pemerintahan daerah se- Malang Raya. *Journal Riset Mahasiswa xxxxxx (JRMx)*, 1-11.

- Hoesada, J. (2016). Akuntansi Pemerintahan.
- Jensen, M., & W.H, M. (1976). "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*.
- Juniawan, M., & Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255.
- Kanaiya, I. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 9, No. 3, 2020 : 1109-1128, 1109-1128.
- Kuntari, Y. (2019). Capital Expenditure of Local Governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1–20.
- Kuntjojo, D. (2009). Metode Penelitian. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*.
- Kusnandar, & Siswanto, d. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Madiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
- Martini, K., & Dwindra, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.2, 426-443.
- Muda, I., & Azura, A. (2018). Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia. *Earth and Environmental Science*, 1–20. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012065>
- Mutiah, & Mappanyuki, R. (2015). The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(9), 14–22.
- Napitu, A. E., & Dillak, V. J. (2018, Desember). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2013 - 2016). *e-Proceeding of Management*, 5, 3358.
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case. *Research Journal of Finance*, 107–113.
- Permatasari Isti. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5.
- Purbarini, E., & Madjojo, G. (2015). Flypaper Effect Tracer on Operating Expenditure and

- Capital Expenditure of City Government in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9–15.
- Rahayu, R. (2017). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal di Provinsi Sumatra Barat. 1-25.
- Ramadhan, K. M., & Murzuki. (2017). Pengaruh Pendaatan Asli Daerah, Dana bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Dapil II Provinsi Aceh. *Jurnal manajemen Indonesia*, 8, 634-645.
- Rosadi, A. I., & Saputra, I. D. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum dan SiLPA pada Alokasi Belanja Modal*, 1114-1173.
- Samoedra, B. (t.thn.). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.
- Scott, W. (United States). *Financial Accounting Theory Seventh Edition*. Canada Cataloguing.
- Setiyani Rita Devi. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal studi empiris pada kabupaten/kota di Karisidenan Pati periode 2009-2013.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Imroatus Sholikhah / Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014), 553-562.*
- Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010). Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. 1-12.
- Siswanto, D. (2014). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. *Universitas Indonesia.*
- Soejoto, A. W., & Suryanto. (2015). Fiscal decentralization policy in promoting indonesia human development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 763–771.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor Faktor yang mempengaruhi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia . *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 14 No. 1 Juni 2016*, 19-40.
- Sujarweni , V. (2015). Akuntansi Manajemen.
- Sumarsono, H., & Rahmawati, F. (2017). The Phenomenon Flypaper Effect in Balanced Funds, Regional Revenue and Surplus Budget Funding of Economic Growth and Regional Expenditure in Districts/City East Java Province. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 8(1), 42–52.
- Susilowati, E., & Rahmadewi, D. (2017). Encouraging a Regional Autonomy in Indonesia: An Analysis of Factors Affecting the Own Source Revenue of Central Java Province. *IRCHE*, 1–20.

- Syam, A. L., & Oikawa, S. (2018). Influence of PAD and DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable on Regency and Municipal Government in South Kalimantan Province . *Journal Research and Analysis: Economy*, 1–9.
- Venkataraman, S., & Urmi, A. (2017). Development Expenditure, Fiscal Consolidation and Public Revenue in India. . *International Journal of Accounting and Economic Studies*, 16–18.
- Wahyuni, & Adi, P. (2009). "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se Jawa- Bali)". *The 3rd National Conference UKWMS*.

IDENTITAS DIRI



Nama : Dimas Arif Prasetyo
NIM : 31401700057
TTL : Pemalang, 10 April 1998
Alamat : RT 03 RW 03 Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
No. HP : 08986996993
Email : dimasarifprasetyoo55@gmail.com
Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Alamat Instansi : Jl. Kaligawe Raya No.KM, RW.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
Judul Artikel : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Nama Instansi	Tahun	Jurusan
SD	SD N 1 Cibelok Pemalang	2004 – 2010	-
SMP	SMP N 2 Taman Pemalang	2010 – 2013	-
SMA	SMA N 1 Pemalang	2013 – 2016	IPA
S1	UNISSULA Semarang	2017 – 2021	Akuntansi